

MENAKAR PERAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI MALUKU UTARA DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019

Fauzi Kurniawan, Dedi Supriadi, Shelma Aulia Shafira, Istiqomatu Aini, Lintang Hanindya Charminggadevi
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara

Abstract

This study is a quantitative study that aims to examine how the government consumption expenditure and the household consumption expenditure provide the multiplier effect on economic growth in North Maluku Province. The data used in this study is time series data obtained from the Central Statistics Agency by taking the period 2020Q1 to 2021Q4. The research methodology used in this study is the concept of the Marginal Propensity to Consume (MPC) formula which is the central of keynesian concept in the three-sector economy. The results show that household consumption expenditure will be increased by 0.15% if there is 1% economic growth. Aside from that, a 1% increase in government consumption expenditure will increase 1.17% of economic growth. The results of this study are sufficient to prove that the government consumption spending during the Covid-19 pandemic is able to make an important contribution to maintain the economic growth, especially in the North Maluku region.

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menelisik bagaimana pengeluaran konsumsi pemerintah dan pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Data yang digunakan merupakan data runtut waktu yang berasal dari Badan Pusat Statistik dengan mengambil periode 2020Q1 sampai dengan 2021Q4. Metodologi penelitian digunakan adalah konsep formula Marginal Propensity to Consume (MPC) yang merupakan konsep sentral keynesian dalam perekonomian tiga sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga akan meningkat sebesar 0,15% apabila terdapat pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Selain itu, pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat 1% akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1,17%. Hasil penelitian tersebut sudah cukup membuktikan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah di masa Pandemi Covid-19 mampu berkontribusi penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah Maluku Utara.

Keywords: Konsumsi Rumah Tangga, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah

JEL Classification: E210, E620, H76

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Musgrave dan Musgrave (1991) pemerintah dalam suatu sistem perekonomian mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi merupakan peran pemerintah dalam mengalokasikan sejumlah barang/jasa publik yang tidak dapat diproduksi oleh sektor privat. Pemerintah menjalankan fungsi distribusi untuk memberikan pemerataan alokasi sumber daya ekonomi menggunakan berbagai instrumen seperti subsidi dan pajak. Sedangkan fungsi stabilisasi dilakukan pemerintah untuk menjaga kestabilan aktivitas perekonomian agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam bentuk kebijakan fiskal oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kebijakan fiskal menurut Keynes merupakan upaya intervensi pemerintah dalam perekonomian melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Di Indonesia, pengaturan tersebut diimplementasikan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2013, anggaran pendapatan dan belanja pemerintah merupakan rencana keuangan yang bersifat tahunan dan sudah mendapatkan persetujuan dari legislatif. Anggaran pendapatan dan belanja tersebut merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah sebagai sarana transmisi pengalihan daya beli masyarakat dalam bentuk pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk pemerataan daya beli masyarakat (Santoso dalam Kuncoro, 2007).

Pada praktiknya, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal dengan mengatur tingkat penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk menciptakan kondisi perekonomian yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif. Pengeluaran pemerintah atau konsumsi pemerintah menurut Badan Pusat Statistik dalam situs resminya, merupakan variabel yang digunakan untuk menghitung pendapatan domestik bruto (PDB) dari aspek *aggregate demand*. Pendapatan domestik bruto itu sendiri selama ini dikenal sebagai proksi dalam menjelaskan bagaimana skala ekonomi suatu wilayah terus bertumbuh dan memberikan

peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Tidak hanya di tingkat nasional, dalam tataran perekonomian regional, penghitungan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi *aggregate demand* juga menggunakan konsep yang sama.

Selain menjelaskan seberapa besar skala ekonomi suatu wilayah, PDRB juga dapat dikatakan sebagai sebuah konsep mengenai pendapatan suatu daerah. Setiap tahunnya nilai PDRB itu sendiri dapat berubah-ubah bergantung dari perubahan berbagai variabel ekonomi yang membentuknya. Perubahan-perubahan pada variabel yang membentuk PDRB itu sendiri dikenal sebagai konsep multiplier atau angka pengganda. Angka pengganda akan memberikan gambaran bagaimana perubahan PDRB dapat dipengaruhi oleh perubahan variabel dari sisi *aggregat demand*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep angka pengganda itu akan mengukur seberapa besar dampak perubahan variabel-variabel seperti pengeluaran pemerintah terhadap PDRB.

Pandemi COVID-19 membuat sektor ekonomi melemah di semua lini. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan *extra ordinary* untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, mulai dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN), *exit strategy* atau pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan normal baru, hingga reset transformasi ekonomi untuk mendorong percepatan ekonomi. Upaya tersebut mulai menampakkan hasil jika melihat dari pertumbuhan ekonomi sebagai indikator perekonomian. Badan Pusat Statistik telah melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%.

Positifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh positifnya pertumbuhan ekonomi secara regional. Pada Provinsi Maluku Utara, menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 secara kumulatif mencapai 16,40%. Angka pertumbuhan tersebut jauh di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai oleh Maluku Utara pada tahun 2021 tersebut salah satunya dibentuk oleh kontribusi pengeluaran pemerintah di wilayah Provinsi Maluku Utara yang mencapai 23,42% dan kemudian sisanya dibagi pada berbagai sektor pengeluaran seperti konsumsi rumah tangga dan non profit serta investasi.

Melihat besarnya kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada 2021, maka kami tertarik untuk menganalisis seberapa besar *multiplier effect* konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.

Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tingkat konsumsi rumah tangga.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak dari belanja yang dilakukan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan fiskal yang mampu memberikan dampak optimal kepada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara.

TINJAUAN LITERATUR

Peranan Sektor Pemerintah Dalam Perekonomian

Peranan sektor pemerintah dalam aktivitas ekonomi sejak Keynes menawarkan teori ekonomi untuk mengatasi depresi besar yang terjadi pada tahun 1930-an. Keynes menganggap bahwa rendahnya permintaan agregat menjadi penyebab rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang menjadi ciri utama pengangguran (Mankiw, 2019).

Dalam rangka meningkatkan permintaan agregat, maka menurut Keynes, pemerintah mengintervensi perekonomian dengan membuat kebijakan defisit anggaran yaitu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mendorong konsumsi dan investasi. Selain itu, adanya hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran juga menjadi sebab bagi keterlibatan pemerintah yang lebih besar dalam program sosial dan ekonomi (Al Qudair, 2005).

Dalam perspektif ekonomi klasik, menurut Adam Smith (dalam Skousen, 2009) pemerintah memiliki peran sebagai pemelihara pertahanan dan keamanan, menegakkan sistem hukum yang bisa menjamin kebebasan, hak milik, dan untuk menjamin perjanjian dan pembayaran kontrak,

sebagai penyedia barang-barang publik, dan yang terakhir adalah sebagai penyelenggara pendidikan umum yang menyeluruh.

Perekonomian dipengaruhi oleh setiap kebijakan pemerintah melalui banyak cara dan disusun dengan berbagai tujuan, namun demikian Musgrave dan Musgrave (1991) merangkumnya menjadi tiga fungsi utama pemerintah, ketiga fungsi tersebut adalah:

a. Fungsi Alokasi

Fungsi ini berkaitan dengan fungsi pemerintah dalam hal penyediaan barang publik, dan proses pembagian semua sumber daya yang digunakan sebagai barang privat dan barang publik, serta menyusun pengaturan komposisi barang publik.

b. Fungsi Distribusi

Pemerintah menjalankan fungsi ini dengan instrumen pajak dan transfer. Fungsi distribusi merupakan peranan pemerintah untuk memastikan alokasi sumber daya ekonomi telah didistribusikan secara adil dan merata sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada.

c. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi merupakan peranan pemerintah untuk menjaga aktivitas ekonomi berjalan sebagaimana mestinya guna mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas ekonomi yang baik, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat.

Kebijakan Fiskal Pemerintah

Penjelasan mengenai fungsi-fungsi pemerintah dalam aktivitas perekonomian di atas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peranan yang amat penting dalam perekonomian. Pemerintah dapat mempengaruhi jalannya perekonomian dengan mengubah-ubah besaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Tindakan atau teknik untuk mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan inilah yang dinamakan sebagai kebijakan fiskal (Suparmoko, 1987). Dengan melakukan tindakan perubahan pada anggaran negara, pemerintah mempunyai dua macam kebijakan fiskal yaitu:

a. Kebijakan fiskal ekspansioner

Kebijakan fiskal ini dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan mendorong permintaan agregat melalui peningkatan pengeluaran pemerintah.

b. Kebijakan fiskal kontraksioner

Kebijakan fiskal ini dijalankan oleh pemerintah pada saat perekonomian mengalami overheating sehingga mendorong pemerintah untuk mengurangi tekanan permintaan agregat dengan mengurangi pengeluaran pemerintah.

Wolfson (dalam Suparmoko, 1987) mengatakan bahwa kebijakan fiskal itu melingkupi semua tindakan atau usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan pemerintah terhadap berbagai sumber daya ekonomi dengan menggunakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan.

Tujuan dari kebijakan fiskal pada intinya adalah untuk menciptakan kestabilan perekonomian sehingga mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan dan mampu mengurangi pengangguran. Suparmoko (1987) berpendapat bahwa tujuan dari kebijakan fiskal adalah peningkatan pendapatan nasional riil pada laju pertumbuhan ekonomi yang dimungkinkan oleh adanya perubahan teknologi dan persediaan faktor-faktor produksi dengan tetap mempertahankan kestabilan fluktuasi harga-harga umum.

Pengeluaran Pemerintah

Samuelson (dalam Wahyuningtyas, 2010) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah adalah keseluruhan pembelian atau pembayaran barang dan jasa yang digunakan untuk kepentingan nasional sebagai contoh pembelian senjata untuk angkatan bersenjata, alat-alat kantor pemerintahan, pembangunan infrastruktur publik, gaji pegawai negeri, dan sebagainya. Pemerintah juga menggunakan pengeluaran pemerintah sebagai instrumen untuk menentukan seberapa besar peran sektor pemerintah dan sektor swasta (Wahyuningtyas, 2010).

Salah satu unsur permintaan agregat adalah pengeluaran pemerintah. Sebagian dari output yang dihasilkan perekonomian dibeli oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik (Mankiw, 2019). Dari sisi permintaan agregat, perhitungan pendapatan nasional pada perekonomian tiga sektor dilakukan dengan konsep pendekatan pengeluaran yang menyatakan bahwa:

$$Y = C + I + G \quad \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana:

- Y = Pendapatan nasional
 - C = Konsumsi rumah tangga
 - I = Investasi rumah tangga
 - G = Pengeluaran pemerintah
- (Sumber : Mankiw, 2019)

Mencermati konsep perhitungan pendapatan nasional tersebut, dapat dilihat bahwa dengan membandingkan nilai pengeluaran pemerintah dengan pendapatan nasional dari waktu ke waktu akan diketahui kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pendapatan nasional.

Efek Multiplier Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Menurut Mankiw (2019), efek multiplier pengeluaran konsumsi pemerintah akan terjadi ketika setiap peningkatan konsumsi pemerintah akan mendorong peningkatan pendapatan yang lebih tinggi dari peningkatan konsumsi pemerintah itu sendiri. Efek multiplier itu sendiri terlihat ketika peningkatan konsumsi pemerintah mendorong peningkatan pendapatan, maka pendapatan akan turut mendorong peningkatan konsumsi. Konsumsi merupakan salah satu determinan yang mempengaruhi pendapatan dari sisi *aggregate demand*, sehingga setiap peningkatan konsumsi akan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya akan kembali meningkatkan konsumsi dan seterusnya. Oleh karena itu, menurut Mankiw (2019), formula multiplier dari konsumsi pemerintah adalah sebagai berikut:

$$kG = \frac{1}{1 - MPC}$$

dimana:

- kG = Multiplier Konsumsi Pemerintah
- MPC = *Marginal Propensity to Consume*

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan bagaimana hubungan konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dengan menggunakan data sekunder yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik

(BPS) Provinsi Maluku Utara. Data sekunder yang dikumpulkan berupa:

- Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Maluku Utara periode 2020Q1 sampai dengan 2021Q4 dalam satuan milyar rupiah;
- Data Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Provinsi Maluku Utara periode 2020Q1 sampai dengan 2021Q4 dalam satuan milyar rupiah;
- Data Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Provinsi Maluku Utara periode 2020Q1 sampai dengan 2021Q4 dalam satuan milyar rupiah.

Dalam rangka mendapatkan kesimpulan dari perilaku data sekunder di atas, maka alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah koefisien angka pengganda dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang menggunakan formula konsep *Marginal Propensity to Consume* (MPC). Menurut Mankiw (2019) MPC merupakan koefisien peningkatan konsumsi yang terjadi ketika terdapat peningkatan pendapatan. Tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mencari fungsi linier regresi sederhana dari Fungsi Konsumsi untuk mendapatkan koefisien MPC;
- Menghitung koefisien multiplier pengeluaran konsumsi pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Untuk memperoleh multiplier effect dari pengeluaran konsumsi pemerintah dan pengeluaran konsumsi rumah tangga, tahapan pertama yang perlu dilakukan adalah membuat asumsi-asumsi dan persamaan linier dari fungsi konsumsi untuk mendapatkan koefisien MPC, yaitu sebagai berikut:

$$C = a + bY$$

Dimana:

C = tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga

Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a = konstanta

b = *slope* atau koefisien dari Y (nilai MPC)

a. Persamaan Linier Fungsi Konsumsi

Dari data sekunder yang diolah menggunakan *software Eviews*, diperoleh persamaan regresi linier sederhana dari fungsi

konsumsi, yaitu $C = 2455,43 + 0,15Y$ (prob: 0,0066). Berangkat dari persamaan regresi tersebut diketahui bahwa nilai MPC yang diperoleh adalah sebesar 0,15 yang berarti setiap ada kenaikan PDRB sebesar satu persen maka tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga akan meningkat sebesar 0,15%.

Dengan asumsi bahwa selain digunakan untuk dikonsumsi, masyarakat juga mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk ditabung, maka besarnya tingkat kecenderungan masyarakat untuk menabung dapat diukur melalui koefisien *Marginal Propensity to Save* (MPS). Koefisien MPS merupakan sebuah koefisien yang menggambarkan seberapa besar kecenderungan masyarakat untuk menabung pada saat penghasilannya meningkat. Dengan menggunakan formula $MPS = 1 - MPC$, maka diperoleh nilai koefisien MPS sebesar 0,85. Koefisien MPS yang lebih besar dari MPC menggambarkan kecenderungan masyarakat Maluku Utara untuk menyimpan sebagian besar penghasilannya lebih tinggi daripada digunakan untuk konsumsi.

b. Multiplier Effect Pengeluaran Pemerintah

Perhitungan *multiplier effect* pengeluaran pemerintah

$$kG = \frac{1}{1 - MPC}$$

$$kG = \frac{1}{1 - 0,15} = \frac{1}{0,85} = 1,17$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh koefisien *multiplier effect* pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 1,17. Angka koefisien pengganda tersebut dapat dimaknai bahwa setiap kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar satu persen maka akan berpeluang meningkatkan PDRB sebesar 1,17%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah telah memberikan *multiplier effect* yang jauh lebih besar terhadap PDRB dimana setiap satu persen kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah akan mendorong peningkatan PDRB sebesar 1,17%. Besarnya *multiplier effect* pengeluaran konsumsi pemerintah menunjukkan besarnya peran pemerintah dalam perekonomian secara langsung ketika berada di dalam krisis kesehatan dengan adanya Pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku Utara.

PEMBAHASAN

Pola Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Maluku Utara pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam konteks Pandemi Covid-19, sesuai dengan hasil regresi fungsi konsumsi rumah tangga pada penelitian ini, diketahui bahwa masyarakat Maluku Utara mempunyai kecenderungan untuk melakukan konsumsi jauh lebih kecil dibandingkan kecenderungan untuk menyimpan sebagian pendapatannya. Perilaku konsumsi masyarakat tersebut dinilai wajar karena pada masa Pandemi Covid-19 terjadi penurunan mobilitas masyarakat menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi untuk membelanjakan sebagai pendapatan yang diperoleh dan masyarakat lebih memilih untuk menahan dan menyimpan sebagian pendapatannya sebagai cadangan untuk menghadapi kondisi perekonomian yang penuh ketidakpastian.

Konsekuensi yang terjadi ketika masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya adalah akan terjadi penurunan tingkat permintaan konsumsi yang kemudian akan ikut menurunkan harga-harga barang/jasa karena suplai barang/jasa lebih besar daripada permintaan barang/jasa. Kondisi tersebut akan menyebabkan terjadinya deflasi dan *oversupply*. Pada awal 2022, dimana terjadi peningkatan konfirmasi kasus positif Covid-19 varian Omicron di beberapa wilayah Indonesia terutama di wilayah Maluku Utara, terdapat penurunan harga-harga selama dua bulan berturut-turut. Pada bulan Februari 2022, penurunan harga terbesar ada pada sektor harga makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,01% dan kelompok transportasi sebesar 3,73%.

Untuk meningkatkan kecenderungan masyarakat Maluku Utara dalam mengonsumsi barang/jasa di masa Pandemi Covid-19, maka penanganan penyebaran Covid-19 harus dilakukan secara akurat dan pruden sehingga diharapkan kasus positif Covid-19 akan terus berkurang. Selain itu pelaksanaan program vaksinasi perlu dilakukan secara lebih masif sehingga mampu menghasilkan kondisi *herd immunity*. Kasus positif Covid-19 yang semakin sedikit dan penggalakan program vaksinasi merupakan kunci utama bagi pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang kemudian akan mengakselerasi PDRB Maluku Utara.

Pada masyarakat Maluku Utara, kecenderungan untuk menyimpan uang memiliki

koefisien jauh lebih besar dari koefisien MPC. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai peluang bisnis sektor perbankan untuk menghimpun dana tabungan tersebut dan menginvestasikannya pada berbagai sektor perekonomian yang lebih strategis. Edukasi literasi perbankan perlu diamplifikasi sehingga masyarakat tidak lagi menyimpan uangnya dengan cara-cara yang konvensional.

Multiplier Effect Konsumsi Pemerintah pada Provinsi Maluku Utara di Masa Pandemi Covid-19

Dalam kondisi krisis yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah adalah kebijakan fiskal yang bersifat kontraksioner melalui mekanisme defisit anggaran dimana pengeluaran pemerintah akan digenjut sehingga melebihi target penerimaan pemerintah. Pada periode 2020-2021, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan fiskal kontraksioner melalui Program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) yang digunakan sebagai bantalan untuk menahan penurunan indikator pertumbuhan ekonomi. Apabila dibandingkan dengan kondisi normal, maka dapat dimungkinkan bahwa pengeluaran pemerintah akan mempunyai dampak yang jauh lebih besar di masa krisis.

Multiplier effect pengeluaran pemerintah yang lebih besar daripada peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah itu sendiri menandakan bahwa bagi Provinsi Maluku Utara, pengeluaran pemerintah masih menjadi variabel yang sangat menentukan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif. Bahkan pada tahun 2021, Maluku Utara mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia sebesar 16,40% dimana sekitar 23% dikontribusikan oleh pengeluaran konsumsi pemerintah.

Dampak lanjutan dari peningkatan PDRB yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah adalah masyarakat Maluku Utara akan mempunyai *extra income* yang akan digunakan untuk meningkatkan konsumsinya dengan asumsi terjadi penurunan kasus Covid-19 dan aktivitas masyarakat di luar rumah mulai melonjak.

Melihat besarnya dampak yang diberikan oleh pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di masa Pandemi Covid-19 maka pemerintah perlu

melakukan akselerasi realisasi belanja pemerintah di awal-awal tahun 2022 khususnya pada belanja-belanja yang memberikan *benefit* secara langsung bagi masyarakat, sebagai contoh belanja bantuan sosial, belanja modal untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat padat karya, dan pemberian subsidi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada masa Pandemi Covid-19, masyarakat Maluku Utara cenderung mempunyai pola konsumsi yang sangat pruden. Dalam kondisi krisis kesehatan yang penuh dengan ketidakpastian, selama periode 2020-2021, masyarakat Maluku Utara cenderung menahan tingkat konsumsinya dan menyimpan sebagian besar penghasilannya.

Perilaku masyarakat yang cenderung menahan konsumsinya mengakibatkan terjadinya deflasi terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dan kelompok transportasi. Penanganan pandemi Covid-19 yang kredibel menjadi kunci agar tingkat konsumsi dapat kembali meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari aspek pengeluaran konsumsi pemerintah, efek multiplier pengeluaran konsumsi pemerintah yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi menandakan bahwa kebijakan kontraksi fiskal pemerintah dengan memperbesar belanja melalui Program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) terbukti mampu menjadi penahan gempuran krisis kesehatan yang dinilai mampu membuat pertumbuhan ekonomi anjlok hingga ke tingkat negatif sebagaimana yang dialami oleh pertumbuhan ekonomi tingkat nasional.

Saran

Berangkat dari hasil penelitian di atas, maka beberapa hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

a. Dalam rangka meningkatkan mobilitas masyarakat, pemerintah perlu melakukan penanganan penyebaran Covid-19 dengan lebih kredibel untuk menahan perluasan penyebaran virus Covid-19 varian Omicron dan memperluas jangkauan vaksinasi yang saat ini sedang berjalan sehingga kondisi *herd immunity* dapat tercapai dan Provinsi Maluku Utara dapat mencapai status endemik;

b. Akselerasi belanja pemerintah perlu terus didorong terutama pada belanja-belanja yang langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang harapannya dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mampu menghasilkan kondisi tingkat konsumsi yang berkontribusi optimal dalam pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.

REFERENSI

- Al Qudair, Khalid H.A. (2005). *The Relationship Between Government Expenditure and Revenues in the Kingdom of Saudi Arabia: Testing for Cointegration and Causality*.
- Kuncoro, Haryo. (2007). *Kausalitas Antara Penerimaan, Belanja, dan PDRB Pada Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang Hal: 195-211.
- Mankiw, Gregory. (2019). *Makroekonomi Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Penerbit Erlangga;
- Musgrave, R.A dan P.B. Musgrave. (1991). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Erlangga;
- Skousen, Mark. (2009). *Sang Maestro "Teori-teori Ekonomi Modern": Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group;
- Suparmoko, M. (1987). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada;
- Wahyuningtyas, A.E. (2010). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Defisit Anggaran Terhadap Investasi di Indonesia (1986-2008)*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro;